

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, baik pada tatanan sosial, ekonomi maupun budaya, namun demikian hasil kegiatan pembangunan belum dapat menghilangkan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup tingginya angka kemiskinan di Indonesia yaitu 14 persen pada tahun 2009 ([www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)), yang juga mengakibatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia masih tinggi.

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2011, tiga peringkat kemiskinan terbesar di Indonesia terdapat di pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 4.648.630 jiwa, Jawa Tengah 5.107.360 jiwa dan Jawa Timur 5.356.210 jiwa, dimana Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kemudian di susul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa ini memuntut pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk bekerja lebih keras lagi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun 2009-2011 dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Pada Tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Presentase Kemiskinan (%)		Garis Kemiskinan (Rupiah)/Bulan		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
2009	2.148,5	3.874,1	12,17	21,00	202.624	174.628	2,18	3,54	0,60	0,91
2010	1.873,5	3.655,8	10,58	19,74	213.383	185.879	1,53	3,18	0,37	0,79
2011	1.768,23	3.587,98	9,87	18,19	234.546	206.275	1,51	2,96	0,34	0,72

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Menurut data tersebut indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa lebih besar dibandingkan di kota, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di daerah pedesaan harus lebih intensif.

Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab agnesia seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrastruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpencil dan sulit melakukan kegiatan ekonomi.

Sementara ini untuk menangani permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, pemerintah melalui Departemen/Kementerian Sosial menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan



program asistensi kesejahteraan sosial keluarga. Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dan jaminan sosial dengan melibatkan pendampingan sosial. Pendamping sosial merupakan agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi keluarga miskin yang disebabkan oleh lemahnya kondisi sumberdaya manusia untuk mengakses sumberdaya ekonomi dan sosial (Suharto, 2005).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting setelah reformasi di Indonesia bergulir serta membawa implikasi bagi bergesernya paradigma pembangunan yang pada awalnya memandang kegiatan produksi sebagai bagian terpenting dalam pembangunan menjadi sebuah paradigma baru yang memandang pentingnya masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*), (Adi, 2001).

Sedangkan Kelompok Usaha Bersama itu sendiri adalah kelompok warga yang telah dibina melalui proses kegiatan program kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Tujuan KUBE ini adalah untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses

pasar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait (Depsos RI, 2004).

Pemerintah Provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia mewujudkan program pemberdayaan tersebut melalui pembentukan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian bantuan yang disediakan dari dana dekonsentrasi baik dari APBD I atau Provinsi maupun APBD II atau Kabupaten/Kota. KUBE mempunyai tujuan yaitu : a.) Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, b.) Meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, dan c.) Pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian. Pada prinsipnya program KUBE diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah (Depsos, 2005).

Berdasarkan tahap pengembangannya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) digolongkan menjadi tiga tipologi, yaitu tumbuh, berkembang dan maju (mandiri). KUBE tumbuh merupakan kelompok usaha yang baru berjalan, telah menerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan telah memiliki pendamping. KUBE berkembang adalah kelompok usaha yang telah didasarkan atas pembagian kerja sesuai dengan kepengurusannya, keuntungan usaha telah berkembang dan telah terbentuk modal. KUBE maju adalah kelompok usaha yang telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik (Departemen Sosial, 2005).

Dalam perkembangannya Kementerian Sosial melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) sebagai tindak lanjut dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) atau

program pengembangan KUBE ini, dimana program ini ditujukan untuk KUBE tumbuh yang pernah dibentuk atau diberdayakan oleh dinas sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bantuan berupa bantuan uang sebesar 30.000.000 rupiah yang disalurkan melalui perbankan ini diperuntukkan untuk Kelompok Usaha Bersama yang telah diberdayakan sebelumnya melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada tahun 2011, Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, menjadi sasaran dari Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang berasal dari Kementerian Sosial ini. Terpilih 2 kecamatan di Kabupaten Malang yang menerima program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), yaitu Desa Dawuhan dan Desa Pandansari di Kecamatan Poncokusumo, serta Desa Srimulyo di Kecamatan Dampit. Sebelumnya, ketiga desa tersebut pernah mendapatkan bantuan stimulant dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) atau program Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi yang berasal dari dana dekonsentrasi APBD I atau provinsi pada tahun 2009.

Terpilihnya 2 kecamatan tersebut karena Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berada di tiga desa dari dua kecamatan tersebut berhasil mengembangkan modal awalnya sebesar lebih dari 30 persen dari bantuan program yang pertama yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM). Dibawah ini merupakan daftar dari sepuluh kelompok usaha bersama di desa

dawuhan yang telah terpilih untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).

Tabel 1.1.2

Daftar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

Nama KUBE	Ketua	Sekretaris	Bendahara
<b>Pandu</b>	Sakrip	Senan	Suwoko
<b>Sengkuni</b>	Slamet Sugianto	Nakrowi	Suliyono
<b>Sugriwa</b>	Kalek	Sukeno	Tarsi
<b>Sadewo</b>	Ruba'i	Aripin	Samat
<b>Ontorejo</b>	Paidi	Dedik Karwanto	Suroto
<b>Nakula</b>	Matrokim	Imam Safi'i	Sukirno
<b>Subali</b>	Darnamun	Hanto	Riono
<b>Puntodewo</b>	Supa'i	Sodikin	Sutrisno
<b>Arjuno</b>	Munari	Supangat	Matasik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malang

Meskipun sepuluh dari 30 kelompok yang berada di Desa Dawuhan tersebut terpilih untuk mendapatkan atau menerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) atau Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) tahap II bukan berarti sepuluh kelompok tersebut sudah dikatakan mandiri, karena pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan memiliki banyak indikator-indikator lain yang harus tercapai selain peningkatan modal maka proses pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama ini masih akan terus berlanjut.

Dari uraian permasalahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama** (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo)”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

## 1.4 Kontribusi Penelitian

Sedangkan kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Bagi akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya bidang Administrasi Pembangunan.
  - b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang mendalami bahasan yang sama.
  - c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaharui konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat memberi pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi peneliti, dapat meningkatkan kemampuan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan maupun pengembangan konsep Administrasi Pembangunan, khususnya dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu media sosialisasi untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yakni :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan latar belakang yang memuat urgensi tentang gambaran umum pembangunan, kemudian dipaparkan juga beberapa masalah umum pada pembangunan terutama masalah kemiskinan, kemudian dipaparkan pula bagaimana cara pemerintah menangani kemiskinan tersebut, yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan teori-teori dan pendapat yang menjadi acuan atau landasan dalam penelitian, diantaranya meliputi kajian teoritis tentang



administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kelompok sosial dan kajian yang berkaitan dengan penelitian khususnya untuk menjawab rumusan masalah.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari proses penelitian yang disertai dengan pembahasan yakni analisis yang diperoleh dari perbandingan antara teori-teori yang diuraikan pada bab tinjauan pustaka dengan data yang diperoleh dari penelitian yang sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah dan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yang berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian skripsi, khususnya pembahasan dan analisis dari bab sebelumnya dan juga saran-saran yang bisa direkomendasikan.